

28 FEBRUARI, SEMUA DOKUMEN SIAP

Sumbu Filosofi Yogyakarta Targetkan Lolos Sidang UNESCO

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap pengajuan Sumbu Filosofi bisa lolos dalam Sidang UNESCO September 2023 mendatang. Jika berhasil lolos, keberadaan Sumbu Filosofi Yogyakarta akan memperkaya warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

"Mudah-mudahan semua taha-
pannya lancar. Kalau untuk sidang-
nya, saya belum bisa memastikan
bisa hadir atau tidak (saat sidang).
Mungkin nanti mengajukan permohonan saja. Ya harapannya (pengajuan Sumbu Filosofi) bisa gol," kata Gubernur DIY seusai menerima audiensi Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid di Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (3/2).

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi. Selain persoalan Sumbu Filosofi, dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal peluang penyelenggaraan Dana Abadi Kebudayaan di daerah, termasuk di DIY.

Sultan mengusulkan, sebelum hal itu dilakukan sebaiknya diupayakan untuk menyamakan persepsi lebih dulu tentang konteks kebudayaan untuk seluruh daerah di Indonesia. Jadi perlu ada satu visi agar ada kesamaan tentang konteks kebudayaan.

"Saya kira perlu ada kesamaan atau satu visi, agar bisa sama di semua provinsi soal konteks kebudayaan itu apa. Jangan sampai nanti ada perbedaan persepsi, sehingga pendanaannya jadi keliru, nanti malah bikin repot," ungkap Sultan.

Menurut Hilmar Farid, Sumbu Filosofi Yogyakarta sudah masuk nominasi dan akan turut dibahas dalam Sidang Komite Warisan Budaya UNESCO bulan September 2023 mendatang. Sidang itu rencananya digelar di Riyadh, Arab

Saudi.

"Kami datang untuk memberitahukan tentang persiapan yang sudah kami lakukan dan sudah sampai mana. Selanjutnya, kami juga membahas soal Program Manajemen Talenta Nasional. Rencananya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan soal kegiatan dan pelaku budaya dari DIY mana saja yang bisa dimasukkan dalam kerangka Manajemen Talenta," jelas Hilmar Farid.

Sedangkan mengenai Dana Abadi Kebudayaan, Hilmar mengungkapkan, saat ini dana tersebut sudah ada di tingkat nasional. Saat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah keluar, ada amanat pula terkait pengalangan Dana Abadi Kebudayaan di daerah.

"Gubernur DIY sempat mengingatkan sebelum skema itu dibuat, ada baiknya pemahaman terkait kebudayaan juga sama di semua kalangan. Sehingga ketika dana semacam ini dibentuk, dalam pelaksanaannya bisa betul-betul efektif," imbuhnya.

Dian Lakshmi Pratiwi menambahkan, saat ini pihaknya sedang berproses mempersiapkan semua dokumen terkait pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya UNESCO yang dibutuhkan saat sidang. Targetnya, semua dokumen siap pada 28 Februari 2023 nanti.

"Kami targetkan Februari ini semua sudah siap karena harus segera dikirim ke Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Paris, Prancis. Semoga semuanya lancar, Insya Allah nanti kita bisa maju sidang di September," ujarnya. **(Ria)-d**



KR-Atiék Widyastuti H

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid (baju hitam) turun dari Candi Perwara di kompleks Candi Prambanan, Sleman.

KONSTRUKSI DIBUAT TAHAN GEMPA

Pemugaran Candi Perwara Habiskan Rp 2,6 M

YOGYA (KR) - Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) X meresmikan purna pugar Candi Perwara deret 1 nomor 5 yang berada di kompleks Candi Prambanan, Jumat (3/2). Proses pemugaran memakan waktu tiga tahun dan menghabiskan dana Rp 2,6 miliar berasal dari APBN murni.

"Untuk pemugaran dilakukan selama 10 bulan. Namun untuk studi kelayakan dan teknis sudah berlangsung dua tahun sebelumnya. Biaya pemugaran satu candi kecil dengan ketinggian sekitar 13,5 meter sekitar Rp 2,6 miliar. Terdiri dari study sekitar Rp 400 juta dan pelaksanaan pemugaran fisiknya Rp 2,2 miliar," jelas Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.

Menurutnya, Candi Perwara yang selesai dipugar ini, 70 persen adalah batu asli yang mewakili dari kaki, tubuh hingga atap. Untuk 30 persen sisanya batu baru, yakni andesit. Untuk menyambungkan

antara batu dengan jenis takikan. Dimana ada suker sebagai pencari batu candi dan direkonstruksi oleh steller. "Kalau dulu murni hanya takikan saja. Tapi kini karena pemanfaatannya lebih banyak diinjak dan dikunjungi, kita perkuat dengan angkur dari besi yang dilapisi dengan cat *zincromate* yang anti karat," jelasnya.

Candi ini juga dibuat tahan gempa. Dimana konstruksinya sudah diperkuat. Saat pemugaran, digali sampai pondasi. Selanjutnya diganti baru dan ditambah pasir. Tim pemugaran juga didampingi oleh ahli mekanika tanah. Jadi bisa menghitung kekuatan bangunan dengan lahan.

Dikatakan Hilmar, pemugaran ini sifatnya tidak sebatas ingin mengembalikan situs seperti semula saja. Melainkan lebih dari itu. Karena di dalamnya banyak sekali proses yang membutuhkan penelitian, pengetahuan, sejarah. **(Awh)-f**

WALIKOTA MAGELANG KAGET

Gedung Pemkot Terdapat Logo TNI

MAGELANG (KR) - Walikota Magelang Muchammad Nur Aziz merasa kaget Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jumat (3/2), terdapat logo TNI lagi. Mungkin ada yang belum memahami secara tepat. Oleh karena itu, kebijakan antara institusi TNI yang ditandatangani Panglima TNI sendiri (waktu itu Jenderal TNI Andika Perkasa), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Walikota Magelang.

"Memang agak kaget karena pada tanggal 13 September 2022 kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dan Kementerian Keuangan," kata Walikota Magelang Muchammad Nur Aziz di Magelang.

Dalam kesepahaman itu, sudah ada tahapan-tahapan tentang penyerahan aset dari TNI yang sejak 1985 dipakai dan akan dikembalikan. Setelah penandatanganan kesepahaman itu, pihaknya juga meminta kepada Panglima agar logo maupun plang-plang yang menyatakan, bahwa itu tanah TNI untuk sementara dilepas sampai nanti pe-

nyerahan sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2025.

Ia berharap mudah-mudahan pemasangan logo TNI ini bisa ditinjau ulang karena Pemkot Magelang sudah sepakat akan diserahkan. Bahkan, pihaknya kini sudah menyiapkan diri dengan menetapkan perda, yaitu cadangan pembangunan Balai kota Magelang pada tahun 2022-2024 yang telah disetujui DPRD Kota Magelang.

Terkait dengan hal tersebut telah ditetapkan Perda No 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 19 September 2022.

"Harapan kami kejadian ini bisa menjadi koreksi bagi kami. Saya mohon maaf pada saat panglima baru dengan KSAU, KSAL dan Wadanjen TNI datang di Pemkot Magelang kebetulan saya lagi kunjungan kerja di Kota Singkawang untuk belajar masalah kota toleransi," ujarnya.

Menurut Walikota, pada hari Jumat Pemkot Magelang melayangkan surat untuk melaporkan kepada Menko Polhukam sebagai ke-

menterian yang menginisiasi tentang kesepahaman pemerintah kota bersama dengan TNI dan Kementerian Keuangan.

"Kami memang belum bisa bergerak sebelum ada penyerahan gedung BLK Kementerian Keuangan untuk kesiapan pindah kantor Pemkot Magelang," paparnya.

Sesama aparat negara, katanya, Pemkot Magelang sudah konsekuen 2025 akan diserahkan dan sudah disiapkan semua, hanya untuk menata karena kantor yang diberikan Kementerian Keuangan memang sampai hari ini belum diserahkan.

"Ini pelajaran buat kami, pemkot harus terus menjalin komunikasi. Saya harus ketemu langsung dengan Panglima TNI. Pemerintah kota yang dipinjam harus datang, itu etika," ucapnya.

Muchammad Nur Aziz melanjutkan, "Mungkin itu kekurangan kami. Setelah ganti Panglima, kami belum menghadap lagi dan mohon maaf karena belum lapor tentang hasil MoU yang dahulu," jelasnya. **(Ant)-d**

Sentralitas dan Kesatuan Modal Utama ASEAN

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ASEAN tidak boleh menjadi proksi dari pihak mana pun. Untuk itu Presiden juga menekankan pentingnya menjaga sentralitas dan kesatuan sebagai modal utama ASEAN.

"Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia sesuai dengan apa yang di dalam Piagam ASEAN," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden saat menerima kunjungan kehormatan Menlu ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2).

Di samping itu, Presiden menggarisbawahi lima poin kesepakatan para Pemimpin ASEAN atau Five Point of Consensus menjadi kesepakatan utama dalam membantu penyelesaian masalah di Myanmar. "Presiden juga menekankan bahwa Five Point of Consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar," lanjutnya.

Hal lain yang ditekankan Presiden kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN, menurut Retno, yaitu mengenai dorongan

agar ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden mengingatkan agar negara-negara ASEAN bersama-sama menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.

"Jadi intinya itu yang disampaikan Bapak Presiden. Dua hal tetapi sangat substantif, sangat signifikan dan apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi diapresiasi oleh semua Menteri Luar Negeri ASEAN," kata Retno.

Retno menyampaikan, semua negara anggota ASEAN siap mendukung Ketekuaan Indonesia Tahun 2023. "Semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung ketekuaan Indonesia," katanya.

Pemerintah memulai Pertemuan Tingkat Menteri Pertama di bawah ketekuaan Indonesia. Pertemuan tersebut yaitu Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dilaksanakan selama dua hari di DKI Jakarta. "Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa hari ini dan besok para Menteri Luar Negeri ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan yang dimulai siang ini yaitu Working Lunch," ucap Menlu. **(Sim)-d**



KR-Riyana Ekawati

Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid.

USULAN BIAYA HAJI 2023

Bisa Turun di Bawah Rp 50 Juta

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyatakan menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan sebesar Rp 69 juta kepada anggota jemaah haji karena akan memberatkan masyarakat. Berdasarkan kemampuan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, ia berharap Kementerian Agama (Kemendagri) RI dapat menurunkan BPIH sampai di bawah Rp 50 juta.

"Menolak kenaikan biaya haji sebesar itu karena memberatkan calon haji," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/2). Hal tersebut ia sampaikan ketika tengah melakukan kunjungan kerja dan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan pihak penyelenggara haji di Arab Saudi, Kamis (2/2), untuk mengecek langsung terkait estimasi persiapan dan memastikan dengan ideal ongkos haji.

"Tadi kami baru saja selesai rapat Panja, rapat di Kedutaan RI di Makkah, yang dihadiri Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), penyelenggara haji di Makkah dan maskapai Garuda," ujarnya.

Terlebih, lanjut Achmad, kemampuan ekonomi kebanyakan anggota jemaah haji Indonesia yang datang dari berbagai latar belakang profesi itu belum mencukupi apabila pemerintah memutuskan kenaikan BPIH sebesar Rp 69 juta.

"Kita tahu kebanyakan yang naik haji dari para petani, nelayan, pedagang kecil dan buruh yang mempunyai keinginan melaksanakan kewajiban umat Islam. Akan tetapi, niat suci itu terhalang dengan biaya yang sangat mahal. Sebenarnya ini harus dipikirkan Pemerintah, tanpa harus memberatkan masyarakat," ucapnya.

Menurut dia, masyarakat haji harus dapat ditekan oleh Pemerintah

tanpa mengurangi pelayanan terbaik yang diberikan kepada jemaah haji.

Ia menjelaskan, Panja Komisi VIII DPR RI mengusulkan ke Kemenag untuk dapat menurunkan beberapa komponen biaya haji. Misalnya, biaya catering, maskapai penerbangan, akomodasi hotel dan waktu jemaah haji selama di Makkah. Untuk akomodasi hotel, lanjutnya, Komisi VIII DPR mengusulkan kontrak hingga 5 tahun, yang sebelumnya selama 1 tahun saja.

Untuk komponen biaya terkait dengan waktu jemaah haji selama di Makkah, ia menyebut sebelumnya jemaah haji berada di Makkah selama 40 hari, menjadi 30 hari atau 35 hari.

Oleh karena itu, dengan mencermati pengurangan pada sejumlah komponen biaya, menurutnya, hal tersebut akan berdampak pada penurunan biaya haji, sehingga tidak akan memberatkan masyarakat. **(Ati/Ant)-d**



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

BANJIR LUAPAN SUNGAI: Warga melintas di halaman SD Negeri 2 Plosowangi, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023). Intensitas hujan tinggi di wilayah Kabupaten Klaten membuat aliran Sungai Dengheng meluap dan mbanjiri sejumlah rumah warga, sekolah, dan jalan utama Pedan-Cawas.